

IMPLEMENTASI PROGRAM *POLICE GOES TO SCHOOL* SEBAGAI SARANA UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SISWA TERHADAP KESELAMATAN BERLALU LINTAS DI SMAN 1 LEMBANG

Keisha Alifa Miliana¹, Dadang Sundawa², Dwi Iman Muthaqin³

^{1,2,3}PPKN, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

[1keishaalifa01@upi.edu](mailto:keishaalifa01@upi.edu), [2dadangsundawa@upi.edu](mailto:dadangsundawa@upi.edu), [3dwiimanm@upi.edu](mailto:dwiimanm@upi.edu)

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Police Goes to School Program in increasing students' traffic law awareness at SMAN 1 Lembang. This research used a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The research informants included police officers, the vice principal for student affairs, teachers, and students. The results indicate that the Police Goes to School Program was implemented through planning, implementation, and evaluation stages, involving collaboration between the school and the police. This program had a positive impact on increasing students' legal awareness, as demonstrated by increased knowledge of traffic regulations, improved discipline and responsibility, and changes in students' behavior in complying with traffic safety regulations. However, several obstacles remain, influenced by family and community environments, and a less than fully supportive legal culture. Therefore, sustainable program implementation is necessary to ensure optimal development of students' legal awareness.

Keywords: Police Goes to School, Legal Awareness, Traffic Safety, Civic Education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program *Police Goes to School* dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa di SMAN 1 Lembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak kepolisian, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru, dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program *Police Goes to School* dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan kerja sama antara pihak sekolah dan kepolisian. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa yang ditunjukkan melalui bertambahnya pengetahuan mengenai aturan lalu lintas, meningkatnya sikap disiplin dan tanggung jawab, serta perubahan perilaku siswa dalam mematuhi aturan keselamatan berlalu lintas. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dipengaruhi oleh

lingkungan keluarga, masyarakat, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan program yang berkelanjutan agar pembentukan kesadaran hukum siswa dapat berlangsung secara optimal.

Kata Kunci: *Police Goes to School*, Kesadaran Hukum, Keselamatan Berlalu Lintas, Pendidikan Kewarganegaraan.

A. Pendahuluan

Lalu lintas merupakan bagian integral dari dinamika kehidupan masyarakat modern yang mencerminkan kemajuan peradaban dan perkembangan teknologi transportasi. Dalam konteks sosial, aktivitas lalu lintas mencerminkan intensitas mobilitas masyarakat yang tinggi sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial lainnya. Semakin meningkatnya kebutuhan akan mobilitas tersebut menuntut tersedianya sistem transportasi yang tidak hanya memadai secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas secara kualitatif, terutama dalam aspek keselamatan, ketertiban, dan efisiensi. Lalu lintas tidak hanya dilihat sebagai aktivitas fisik berupa pergerakan kendaraan dan manusia di ruang jalan, melainkan juga sebagai representasi dari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi suatu masyarakat. Misalnya, perilaku

pengguna jalan dapat mencerminkan tingkat disiplin hukum, kepedulian sosial, dan budaya berlalu lintas yang berlaku di masyarakat tersebut. Di negara-negara dengan kesadaran hukum dan budaya tertib yang tinggi, lalu lintas cenderung lebih teratur dan minim pelanggaran, sedangkan di wilayah dengan rendahnya literasi hukum lalu lintas, berbagai permasalahan seperti kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran aturan lebih sering terjadi.

Dalam perspektif hukum, lalu lintas merupakan arena implementasi kebijakan publik yang menuntut sinergi antara regulasi yang memadai, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat. Keberadaan aturan lalu lintas seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa aspek hukum menjadi landasan utama dalam pengaturan dan pengendalian aktivitas lalu lintas. Oleh karena itu,

lalu lintas tidak hanya menjadi urusan teknis transportasi semata, melainkan juga menjadi isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang menyangkut tata kelola ruang, perlindungan lingkungan, dan pembentukan karakter warga negara yang sadar hukum serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, pengaturan lalu lintas menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh seluruh elemen bangsa karena menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan kelangsungan hidup masyarakat (World Health Organization, 2023).

Tingginya volume kendaraan bermotor dan pertumbuhan jumlah pengguna jalan di Indonesia tidak diimbangi dengan peningkatan yang signifikan terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan yang menyebabkan kerugian materiil bahkan korban jiwa. Berdasarkan data dari Korlantas Polri tahun 2024, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih sangat tinggi dan didominasi oleh pengendara

berusia produktif, termasuk remaja dan pelajar (Polri, 2024).

Dalam kehidupan sehari-hari, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sering kali dianggap sebagai hal sepele, padahal ketidak taatan terhadap aturan tersebut dapat berakibat fatal. Tidak sedikit pengguna jalan yang masih mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, berkendara dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan kondisi jalan, menggunakan kendaraan tanpa kelengkapan seperti SIM dan helm, hingga melakukan pelanggaran seperti menerobos lampu merah. Perilaku ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan usia muda yang cenderung lebih impulsif dan kurang mempertimbangkan risiko (Sari & Putra, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai hukum dan membentuk karakter warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab. Melalui pembelajaran PKn, siswa diajak untuk memahami pentingnya peraturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta menginternalisasi nilai-nilai tersebut

dalam kehidupan sehari-hari (Winataputra, 2021).

Dalam konteks ini, integrasi antara PKn dan program edukatif eksternal seperti *Police Goes to School* menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. PKn dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan antara pembelajaran di kelas dan realitas sosial di luar sekolah. Oleh karena itu, ketika PKn berkolaborasi dengan program edukatif eksternal seperti *Police Goes to School*, sinergi ini menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif. Program ini tidak hanya memperkuat materi hukum yang diajarkan dalam kurikulum, tetapi juga memberi ruang kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan aparat penegak hukum, sehingga konsep-konsep hukum yang selama ini bersifat teoritis menjadi lebih konkret dan mudah dipahami (Sapriya, 2017).

Integrasi ini juga mencerminkan model pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter siswa secara holistik. Siswa tidak hanya diajarkan untuk mengetahui hukum, tetapi juga dibimbing untuk menumbuhkan sikap hormat terhadap hukum dan mampu mengambil

keputusan secara bertanggung jawab dalam situasi kehidupan nyata, termasuk dalam berlalu lintas (Putri, 2022). Dengan demikian, integrasi antara PKn dan program *Police Goes to School* bukan hanya strategi edukatif, tetapi juga bagian dari upaya membentuk budaya hukum sejak usia sekolah. *Police Goes to School* merupakan program yang digagas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk intervensi preventif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar. Program ini bertujuan untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelajar melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Program ini telah diterapkan di berbagai daerah dan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa (Wicaksono & Rahmawati, 2023).

SMAN 1 Lembang merupakan salah satu sekolah yang aktif mengimplementasikan program *Police Goes to School* bekerja sama dengan Polsek Lembang. Sekolah ini terletak di wilayah strategis dan mayoritas siswanya menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi ke sekolah. Oleh karena

itu, sekolah ini menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji efektivitas program *Police Goes to School* dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap keselamatan berlalu lintas.

Pendidikan hukum tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri, melainkan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai aktivitas edukatif yang bersifat menyenangkan dan kontekstual. Salah satu inisiatif strategis yang dikembangkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelajar adalah program *Police Goes to School*. Program ini berfungsi sebagai sarana penyuluhan langsung yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lingkungan sekolah, dengan tujuan membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, serta meningkatkan pemahaman siswa mengenai peraturan lalu lintas dan konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian (Putra & Yuliana, 2023), program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap norma hukum serta menumbuhkan kesadaran moral

dalam menjaga keselamatan di jalan raya.

Pelaksanaan program *Police Goes to School* tidak hanya dilakukan dengan menyampaikan materi hukum secara teori, tetapi juga melalui diskusi langsung, kegiatan praktik, serta melibatkan siswa secara aktif dalam simulasi keselamatan berkendara. SMAN 1 Lembang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program ini mengingat karakteristik siswa yang mayoritas menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi ke sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas implementasi program *Police Goes to School* dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terkait keselamatan berlalu lintas, mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi respons siswa terhadap keberlangsungan program tersebut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan evaluasi dan pengembangan kebijakan edukatif serupa di institusi pendidikan lainnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengungkap dan memahami makna di balik perilaku, pengalaman, dan pandangan individu terhadap suatu fenomena sosial, dalam hal ini implementasi program *Police Goes to School* sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum siswa terhadap keselamatan berlalu lintas. Menurut (Sugiyono, 2020), pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (observasi, wawancara, dokumentasi), dan analisis data bersifat induktif, lebih menekankan makna daripada generalisasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Perencanaan Program *Police Goes to School* di SMAN 1 Lembang

Perencanaan Program *Police Goes to School* di SMAN 1 Lembang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, serta monitoring dan tindak

lanjut. Berdasarkan hasil wawancara, tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah dan menentukan kebutuhan materi sosialisasi yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Hasil perencanaan program berdasarkan wawancara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Hasil perencanaan program berdasarkan wawancara

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, pihak sekolah dan kepolisian menyusun kegiatan dengan menentukan jadwal pelaksanaan, bentuk kegiatan, materi, serta pembagian tugas masing-masing pihak. Temuan lapangan ini kemudian dianalisis dan dipadukan dengan teori perencanaan program sehingga menghasilkan skema perencanaan yang lebih sistematis. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap tahapan saling berkaitan untuk memastikan

program berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Gambaran hasil analisis tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2 Skema Alur Perencanaan Program *Police Goes to School*

Secara keseluruhan, perencanaan Program *Police Goes to School* telah dilakukan secara terstruktur melalui identifikasi kebutuhan, penyusunan kegiatan, pelaksanaan, serta evaluasi sebagai dasar perbaikan program di masa mendatang.

Pelaksanaan Program *Police Goes to School* di SMAN 1 Lembang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program *Police Goes to School* memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas siswa. Setelah mengikuti kegiatan, siswa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aturan lalu lintas,

pentingnya keselamatan berkendara, serta risiko yang dapat ditimbulkan akibat pelanggaran lalu lintas.

Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan perilaku siswa. Siswa mulai menyadari bahwa mematuhi aturan lalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari sanksi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Kesadaran ini mendorong sebagian siswa untuk lebih berhati-hati saat berkendara dan lebih memahami pentingnya mematuhi aturan yang berlaku.

Jika dikaji menggunakan konsep kewarganegaraan menurut Winataputra (2012), program ini telah membantu mengembangkan tiga kompetensi utama warga negara, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic disposition* (sikap kewarganegaraan), dan *civic engagement* (partisipasi kewarganegaraan). Siswa memperoleh pengetahuan mengenai aturan hukum, menunjukkan sikap yang lebih bertanggung jawab terhadap keselamatan berlalu lintas, serta berpartisipasi aktif selama

kegiatan berlangsung. Oleh karena itu, Program *Police Goes to School* tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum, tetapi juga mendukung pembentukan karakter siswa sebagai warga negara yang baik (*good citizen*).

Kendala dalam Implementasi pelaksanaan Program *Police Goes to School* dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Keselamatan Berlalu Lintas di SMAN 1 Lembang

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan beberapa kendala dalam program *police goes to school* yang dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal.

Kendala internal pertama yang ditemui dalam pelaksanaan Program *Police Goes to School* adalah terbatasnya alokasi waktu kegiatan. Durasi pelaksanaan yang relatif singkat menyebabkan penyampaian materi belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Akibatnya, beberapa informasi penting hanya dapat disampaikan secara umum sehingga diperlukan kegiatan lanjutan atau penguatan materi agar pemahaman siswa dapat

lebih optimal. Kemudian, banyaknya jumlah siswa yang mengikuti kegiatan dalam satu waktu menjadi tantangan tersendiri bagi pemateri. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas interaksi antara pemateri dengan peserta, khususnya pada sesi diskusi dan tanya jawab.

Tidak seluruh siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pertanyaan maupun pendapat, sehingga proses komunikasi belum dapat berlangsung secara maksimal. Selain itu, setiap siswa memiliki tingkat konsentrasi, minat, serta kemampuan memahami materi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan penerimaan informasi selama kegiatan tidak selalu seragam pada setiap peserta. Sebagian siswa dapat memahami materi dengan cepat, sedangkan sebagian lainnya memerlukan penjelasan tambahan agar dapat memahami isi sosialisasi secara lebih menyeluruh.

Kendala internal lainnya yaitu program ini belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dalam rentang waktu yang berdekatan. Kondisi ini menyebabkan upaya penguatan materi serta pembinaan

kepada siswa masih belum optimal. Padahal, pembentukan kesadaran hukum merupakan proses yang memerlukan kesinambungan agar pengetahuan yang diperoleh dapat berkembang menjadi sikap dan perilaku yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya pun masih dijumpai beberapa kendala teknis, seperti suara pemateri yang kurang terdengar oleh siswa atau ruangan yang berkapasitas besar. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penyampaian informasi karena tidak seluruh peserta dapat menerima materi dengan jelas. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar proses sosialisasi dapat berlangsung dengan lebih optimal.

Selain faktor kendala internal, terdapat pula faktor kendala eksternal. Kendala eksternal pertama yaitu belum optimalnya dukungan dari lingkungan keluarga dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas. Kondisi ini terlihat dari masih adanya orang tua yang mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Keadaan tersebut berpotensi menghambat proses pembentukan kesadaran hukum karena siswa memperoleh contoh perilaku yang kurang sejalan dengan aturan yang telah dipelajari di sekolah.

Teman sebaya juga memiliki peran yang cukup besar dalam memengaruhi perilaku siswa. Apabila siswa berada dalam lingkungan pergaulan yang terbiasa melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, berkendara secara tidak tertib, atau mengabaikan rambu lalu lintas, maka terdapat kemungkinan siswa akan mengikuti perilaku tersebut. Pengaruh negatif dari lingkungan pertemanan dapat mengurangi efektivitas program dalam membentuk perilaku sadar hukum pada siswa.

Kemudian, tingginya angka pelanggaran lalu lintas di lingkungan masyarakat menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program *Police Goes to School*. Siswa masih sering menjumpai berbagai bentuk pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, maupun berkendara secara tidak tertib. Kondisi tersebut dapat

menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan hal yang lumrah sehingga berpotensi mengurangi kesadaran siswa dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

Kendala terakhir yaitu perkembangan teknologi dan media sosial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku remaja. Di satu sisi, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas. Namun, di sisi lain masih terdapat berbagai konten yang menampilkan perilaku berkendara berisiko, balap liar, maupun pelanggaran lalu lintas yang dapat memengaruhi pola pikir siswa. Apabila tidak disertai kemampuan dalam menyaring informasi secara bijaksana, siswa berpotensi meniru perilaku negatif yang ditampilkan melalui media sosial.

Upaya mengatasi Hambatan dalam Implementasi pelaksanaan Program *Police Goes to School* dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Keselamatan Berlalu Lintas di SMAN 1 Lembang

Berbagai upaya dapat dilakukan guna meminimalisir kendala dalam

pelaksanaan program. Untuk kendala internal, yang pertama dapat diatasi dengan menjalin kerja sama yang terbangun antara pihak sekolah dan kepolisian. Sebelum kegiatan dilaksanakan, kedua pihak melakukan koordinasi terkait kebutuhan sekolah, jadwal kegiatan, materi yang akan disampaikan, serta teknis pelaksanaan program. Melalui koordinasi tersebut, kegiatan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa sehingga tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal. Kerja sama ini juga mencerminkan adanya komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan siswa.

Selanjutnya, Materi yang diberikan dalam Program *Police Goes to School* sebaiknya tidak hanya berfokus pada keselamatan berlalu lintas, tetapi juga mencakup berbagai permasalahan yang dekat dengan kehidupan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, tawuran, serta berbagai bentuk kenakalan remaja lainnya. Kesesuaian materi dengan kondisi yang dihadapi siswa menjadikan peserta lebih mudah memahami dan

menghubungkannya dengan pengalaman di lingkungan sekitar. Hal tersebut membuat kegiatan menjadi lebih menarik dan mampu meningkatkan perhatian siswa selama proses sosialisasi berlangsung.

Kemudian, pihak kepolisian sebaiknya tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi serta mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Interaksi yang terjalin antara pemateri dan siswa menciptakan suasana pembelajaran yang lebih aktif sehingga siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan menjadi lebih baik.

Terakhir, Pihak Sekolah perlu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program *Police Goes to School* melalui penyediaan fasilitas, pengaturan jadwal kegiatan, serta berbagai dukungan administratif lainnya. Dukungan tersebut memudahkan pihak kepolisian dalam melaksanakan kegiatan dan memastikan seluruh siswa dapat

mengikuti program dengan baik. Selain itu, keterlibatan pihak sekolah menunjukkan adanya kepedulian terhadap upaya pembentukan karakter serta peningkatan kesadaran hukum pada siswa.

Selain upaya untuk mengatasi masalah internal, terdapat pula upaya untuk mengatasi masalah eksternal. Pertama, dapat dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Dukungan yang diberikan oleh orang tua sangat berperan penting dalam mendukung keberhasilan Program *Police Goes to School*. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pengawasan terhadap aktivitas siswa, pemberian nasihat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, serta pembiasaan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, orang tua yang memberikan teladan dengan mematuhi peraturan lalu lintas dapat memperkuat nilai-nilai yang telah diperoleh siswa selama mengikuti program. Dengan adanya dukungan keluarga, proses pembentukan kesadaran hukum siswa dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kemudian, dukungan dari lingkungan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan lalu lintas dapat menjadi sarana pembelajaran bagi siswa dalam menerapkan perilaku sadar hukum. Ketika siswa melihat masyarakat mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta menghormati pengguna jalan lainnya, siswa akan lebih mudah meneladani perilaku tersebut. Dukungan masyarakat yang positif dapat memperkuat pesan-pesan yang disampaikan dalam Program *Police Goes to School*, sehingga pembentukan kesadaran hukum tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui pengawasan lalu lintas, pemeriksaan kendaraan, serta tindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan siswa terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan efek preventif sekaligus

edukatif, sehingga siswa semakin memahami pentingnya menaati aturan lalu lintas. Dengan demikian, materi yang disampaikan dalam program memperoleh penguatan melalui praktik penegakan hukum di lapangan.

Lingkungan sosial yang positif, khususnya teman sebaya yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik, dapat memberikan pengaruh yang konstruktif terhadap perilaku siswa. Interaksi dengan teman-teman yang disiplin dan patuh terhadap peraturan lalu lintas dapat mendorong siswa untuk menerapkan perilaku serupa. Dengan adanya lingkungan pergaulan yang mendukung perilaku positif, siswa akan lebih mudah mempertahankan nilai-nilai yang telah diperoleh dari program dalam kehidupan sehari-hari.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program *Police Goes to School* di SMAN 1 Lembang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan kerja sama antara pihak sekolah dan kepolisian. Program ini dirancang sebagai sarana edukasi hukum untuk meningkatkan

pemahaman siswa mengenai keselamatan berlalu lintas serta berbagai bentuk perilaku menyimpang yang perlu dihindari

Hasil implementasi progra, *police goes to school* menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum siswa yang ditandai dengan bertambahnya pengetahuan mengenai aturan lalu lintas, tumbuhnya sikap disiplin dan tanggung jawab, serta perubahan perilaku ke arah yang lebih tertib dalam berlalu lintas. Program ini juga berkontribusi dalam pembentukan karakter siswa sebagai warga negara yang baik (*good citizen*). Meskipun demikian, diperlukan dukungan yang berkelanjutan dari sekolah, keluarga, masyarakat, dan pihak kepolisian agar peningkatan kesadaran hukum siswa dapat berlangsung secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Polri, K. (2024). *Data Kecelakaan Lalu Lintas Nasional 2024*. Divisi Humas Polri.
- Putri, A. R. (2022). Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pendidikan Hukum. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 10(3), 215–228.
- Sapriya. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya.
- Sari, D. A., & Putra, H. N. (2021). Analisis tingkat kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan remaja. *Jurnal Keadilan Sosial*, 8(2), 112–125.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wicaksono, R. A., & Rahmawati, S. (2023). Efektivitas Program Police Goes to School dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 14(2), 112–125.
- Winataputra, U. S. (2021). Pendidikan kewarganegaraan dan penguatan karakter hukum siswa. *Jurnal Civic Education*, 9(1), 87–102.
- World Health Organization. (2023). *Global Status Report on Road Safety* 2023. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240061919>